



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 14
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat / Ke-7
Dengan	: Para Kepala Dinas Sosial Provinsi
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Senin, 9 April 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: H. MARWAN DASOPANG, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Pengelolaan Anggaran dan Program di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Permasalahan dan Solusinya
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1.orang dari 45 orang Anggota;2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI. Jakarta;7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB;
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Para Kepala Dinas Sosial dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI Bersama para Kepala Dinas Sosial Provinsi dengan agenda “**Pengelolaan Anggaran dan Program di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Permasalahan dan Solusinya**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi atas kinerja para Kepala Dinas Sosial Provinsi yang telah bekerja keras meningkatkan kesejahteraan sosial, meskipun belum ada proporsionalitas dukungan anggaran dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang harus cepat ditangani. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendorong para Kepala Dinas Sosial Provinsi meningkatkan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, antara lain Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama, Rehabitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Penyaluran RASTRA dan E-Waroeng.
2. Komisi VIII DPR RI akan segera menindaklanjuti bersama Kementerian Sosial dengan memberikan dukungan anggaran yang bersumber APBN guna merespon beberapa kebutuhan mendesak yang perlu mendapatkan dukungan seperti:
 - a. Pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial AIDS, Panti Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa, dan penanganan Korban NAPZA;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial;

- c. Meningkatkan jumlah maupun kemampuan, profesionalitas dan keterampilan SDM dinas sosial serta pekerja sosial; dan
 - d. Pengalokasian dana operasional;
3. Komisi VIII DPR RI mendorong para Kepala Dinas Sosial meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberi respon cepat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), baik dalam bentuk pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi Penanganan Kemiskinan; Korban Sosial Bencana Alam; Korban Sosial Buruh Migran; Lanjut Usia Terlantar; dan Penyandang Disabilitas.
 4. Komisi VIII DPR RI mendesak kepada para Kepala Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan dengan kerjasama dengan satuan kerja lainnya di daerah, kelembagaan sosial, lembaga keagamaan, serta dunia usaha. Di samping itu Kepala Dinas Provinsi segera menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah antar provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada lagi penolakan atau lepas tanggungjawab dalam menangani PMKS.
 5. Komisi VIII DPR RI mendesak kepada para Kepala Dinas Sosial untuk lebih proaktif dalam melakukan verifikasi dan validasi penerima manfaat bantuan sosial sebagai data terpadu, sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
 6. Komisi VIII DPR RI mendesak kepada para Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk melakukan sinergi dan bekerjasama dengan Anggota Komisi VIII DPR RI di daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 7. Komisi VIII DPR RI menyambut positif usulan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Sosial pada APBN dalam mengakselerasi kesejahteraan sosial.
 8. Komisi VIII DPR RI merespon positif dilakukannya usulan penelitian tentang masalah kesejahteraan sosial di daerah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,
Ttd.**

H. MARWAN DASOPANG, M.Si